



Strengthening local government capacity: Assistance in the preparation of the 2024 LP2KD for Central Buton Regency

Eko Satria[✉], Andy Arya Maulana Wijaya, Ansar Suherman, La Ode Muhammad Azhar Sya'ban, Harry Fajar Maulana, Angga Adwian
Universitas Muhammadiyah Buton, Buton, Indonesia

[✉] kizsatria@gmail.com

 <https://doi.org/10.31603/ce.12867>

Abstract

Poverty remains a significant and persistent challenge for Central Buton Regency, with various issues hindering the effectiveness of poverty reduction programs. This activity aimed to assist the Government of Central Buton Regency in preparing the 2024 Regional Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD), as mandated by Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 4 of 2022 and Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 53 of 2020. The implementation method involved initial coordination (kick-off meeting), observation of data needs, and Focused Group Discussions (FGD) with Regional Apparatus Organizations (OPD) to identify the root causes of poverty. The main outcome of this activity was the completion of the 2024 Regional Poverty Reduction Implementation Report (LP2KD) for Central Buton Regency. This report presents a comprehensive analysis of poverty conditions, identifies existing problems, and provides practical recommendations for the formulation of more effective and targeted poverty reduction policies.

Keywords: Poverty reduction; LP2KD; Central Buton

Penguatan kapasitas pemerintah daerah: Pendampingan penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah 2024

Abstrak

Kemiskinan merupakan tantangan signifikan yang berkelanjutan di Kabupaten Buton Tengah, di mana berbagai permasalahan menghambat efektivitas program penanggulangannya. Kegiatan ini bertujuan mendampingi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020. Metode pelaksanaan melibatkan koordinasi awal (kick off meeting), observasi kebutuhan data, dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi akar permasalahan kemiskinan. Hasil utama kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024. Laporan ini menyajikan analisis komprehensif kondisi kemiskinan, identifikasi permasalahan, serta rekomendasi praktis untuk perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Penanggulangan kemiskinan; LP2KD; Buton Tengah

Contributions to
SDGs



Article History

Received: 21/12/24

Revised: 27/02/25

Accepted: 15/03/25

1. Pendahuluan

Kemiskinan telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, masalah ini perlu segera diatasi dengan menerapkan langkah-langkah penanggulangan yang lebih terstruktur, sistematis, dan luas (Kalikoski et al., 2019). Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu dan memenuhi hak-hak dasar sebagai warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, demi terciptanya kehidupan yang bermartabat.

Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan keteringgalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan (Hidayat & Azhar, 2022). Persoalan kemiskinan menjadi keseriusan pemerintah daerah dalam melihat keadaan terhadap kemampuan pendapatan yang menjadi faktor pemenuhan standar hidup, belum lagi soal kemampuan pendapatan ini menjadi fokus tertentu secara kasuistik jika diperhadapkan pada isu gender (Mundzir et al., 2021; Noer, 2021). Informasi utama tentang kemiskinan yang paling menarik perhatian banyak pihak adalah jumlah dan persentase penduduk miskin. Dengan memperhatikan angka ini, maka dapat dipantau tentang keberhasilan pelbagai kebijakan dan program pembangunan dan sekaligus dapat dinilai apakah program tersebut memihak penduduk miskin atau tidak (Yusri, 2024).

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berperan aktif dalam melakukan koordinasi lintas sektor. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah mengalami fluktuasi (Tabel 1). Persentase penduduk miskin di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,90% menjadi 14,90%. Sementara itu, pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,52% menjadi 15,42%, dan pada menurun kembali pada tahun 2024 sebesar 1,02% menjadi 14,40%.

Tabel 1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buton Tengah

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Buton Tengah	15,80	14,90	15,42	14,40

Dengan fluktuasi angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Buton Tengah menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka tersebut secara konsisten. Kemiskinan di daerah ini bukan hanya masalah individu, tetapi merupakan isu yang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga keterbatasan akses pada pendidikan dan kesehatan, yang semuanya memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengatasi (Juliansyah et al., 2024; Sarjito, 2024; Zulyanto, 2022).

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, pendekatan terpadu perlu diimplementasikan. Program yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan, dan bantuan keuangan terbukti mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan (Ahmadzai et al., 2021; Hailu & Amare, 2022; Lin et al., 2022). Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (Valle et al.,

2022; Wahyono et al., 2023), maka penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tugas pokok pemerintah dengan melakukan pendekatan strategi penanggulangan kemiskinan secara tepat, terpadu dan terkoordinasi dengan pelaksanaan secara bertahap, terencana, dan berkesinambungan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan daerah, sehingga penanggulangan kemiskinan yang dimaksud langsung mengarah kepada upaya menyejahterakan masyarakat (Wirata, 2022). Penanggulangan kemiskinan selalu menjadi topik utama dalam setiap perencanaan pembangunan, karena kemiskinan adalah permasalahan utama yang harus dicari cara penyelesaiannya dan ditanggulangi secara sinergis dan sistematis melibatkan semua unsur masyarakat, pemerintah dan badan usaha. Kemiskinan bukan hanya menjadi masalah perseorangan, tapi merupakan permasalahan semua pihak. Karena kemiskinan berdampak sistemik, menyangkut segala sisi kehidupan (Singh & Chudasama, 2020).

Target penanggulangan kemiskinan nasional sangat bergantung pada komitmen, kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah guna menghindari adanya celah ketidaksetaraan kondisi daerah secara regional (Tucker et al., 2022; Ullah et al., 2021). Dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Kabupaten Buton Tengah berupaya mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0% pada tahun 2024 melalui pelaksanaan program yang terencana dan kolaboratif (Marchetti & Secondi, 2022).

Kegiatan pengabdian ini menitikberatkan pada *mapping* yang berbasis pada penelitian terdahulu guna memastikan keterpaduan langkah dan program penghapusan kemiskinan secara konvergen (Howe, 2022; Pham & Mukhopadhyaya, 2022; Shi & Qamruzzaman, 2022; Si et al., 2020). Dengan mengedepankan sinergi program dan anggaran antar kementerian/lembaga, diharapkan tercipta keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan yang fokus pada tiga pilar: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan (Aulia, 2024).

Dengan kondisi tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024, sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020. Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) akan digunakan sebagai dasar untuk program dan kegiatan, sehingga target-target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah dapat tercapai.

2. Metode

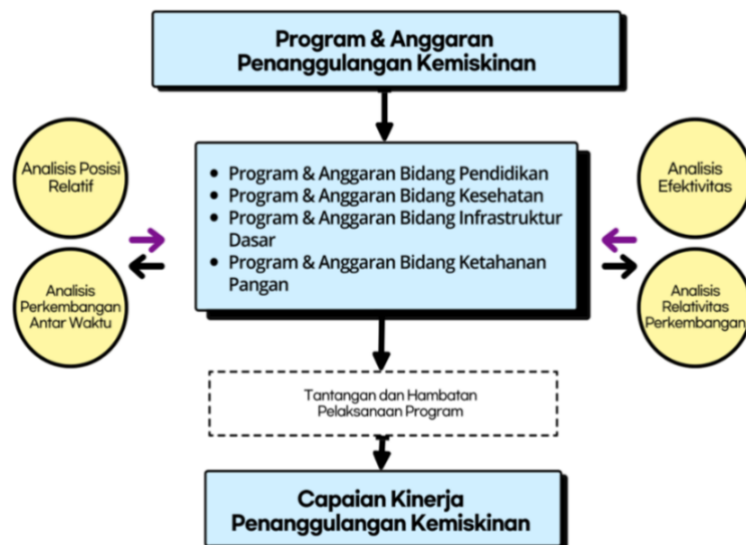
Pelaksanaan kegiatan terkait penyusunan dokumen 'Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buton Tengah 2024' di Aula Bappeda Buton Tengah diikuti oleh beberapa perwakilan OPD Kabupaten Buton Tengah seperti Dinas Pencatatan Sipil, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan ini terselenggara pada tanggal 11 Desember 2024. Metode pengabdian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur.

Kegiatan dimulai dengan persiapan, yang melibatkan koordinasi antara tenaga ahli dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan, yang mencakup beberapa aktivitas, yaitu: diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pengumpulan data lapangan, wawancara, penyusunan dokumen, dan FGD akhir.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan *kick off meeting* yang melibatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Buton Tengah dan tenaga ahli. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan kebutuhan pendampingan dalam penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Selanjutnya, rencana kegiatan disusun dengan melaksanakan observasi guna mengidentifikasi kebutuhan data. Dalam *forum group discussion* (FGD), disampaikan pentingnya pelaporan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Bab V Pasal 20 ayat (2) menyebutkan TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi, dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 pada Bab VI Pasal 25 ayat (1) menyebutkan Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/ Kota kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ayat (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan FGD yang terlaksana, terdapat pemahaman yang sama antara OPD dan Tenaga ahli terkait LP2KD yang disusun berdasarkan kerangka pikir yang disajikan pada [Gambar 1](#).



Gambar 1. Kerangka pikir kegiatan penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah

Laporan yang akan disusun dalam kegiatan pengabdian ini dapat memberikan rekomendasi berdasarkan temuan lapangan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan baru atau memperbaiki kebijakan yang ada. LP2KD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang disajikan pada [Tabel 2](#).

Tabel 2. Konsep draft LP2KD Kabupaten Buton Tengah

BAB I	: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Sistematika Penulisan
BAB II	: KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan B. Koordinasi Perumusan Kebijakan C. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terkait Pemanfaatan Anggaran dan Peningkatan Alokasi D. Integritas Sistem Informasi Data Mikro Penduduk Miskin dan Rentan Miskin Kedalam Sistem Analisis Kemiskinan, Penganggaran dan Pelaporan E. Mekanisme dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat F. Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
BAB III	: CAPAIAN KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN A. Program Penanggulangan Kemiskinan B. Capaian Kinerja Indikator Penanggulangan Kemiskinan 1. Hasil Evaluasi Kondisi Kemiskinan Konsumsi a. Persentase Penduduk Miskin b. Jumlah Penduduk Miskin c. Indeks Kedalaman Kemiskinan d. Indeks Keparahan Kemiskinan e. Garis Kemiskinan 2. Hasil Evaluasi Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi a. Pertumbuhan Ekonomi b. Indeks Pembangunan Manusia c. Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan d. Evaluasi Bidang Pendidikan e. Evaluasi Bidang Kesehatan f. Evaluasi Bidang Infrastruktur Dasar g. Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan C. Evaluasi Kinerja Tahunan
BAB IV	: RENCANA TINDAK LANJUT A. Strategi Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat B. Strategi Peningkatan Pendapatan Masyarakat C. Strategi Pengurangan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan
BAB V	: PENUTUP A. Kesimpulan B. Rekomendasi

Selama pelaksanaan FGD ([Gambar 2](#)), para OPD terkait yang hadir secara aktif melakukan dialog bersama tenaga ahli dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan program OPD yang berhubungan langsung dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah. Melalui FGD tersebut, diskusi disesuaikan dengan kerangka pikir kegiatan dan sistematika penyusunan, sehingga dapat mencapai tujuan penyusunan LP2KD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.

Laporan ini berhasil memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kemiskinan di daerah ini, serta mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, laporan ini menyajikan rekomendasi dan sasaran strategis yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,

serta mendukung keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah. Dengan demikian, hasil dari kegiatan ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut. Dalam FGD, OPD juga mendiskusikan masalah kemiskinan secara mendalam, menggali akar permasalahan, bukan hanya gejala yang tampak. Memahami akar masalah memungkinkan upaya penanggulangan menjadi lebih tepat sasaran, dan sering kali melahirkan rekomendasi praktis yang dapat langsung digunakan oleh tenaga ahli dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Rekomendasi ini berbasis pada pengalaman serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Buton Tengah, memastikan bahwa laporan yang disusun memenuhi kebutuhan data yang tersedia secara objektif (Ponce et al., 2020; Rammohan & Tohari, 2023).



Gambar 2. Kegiatan FGD penyusunan LP2KD

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya LP2KD yang menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kemiskinan, identifikasi permasalahan yang dihadapi, serta rekomendasi praktis untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, laporan ini menjadi landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Buton Tengah.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tengah yang telah memberikan kami kepercayaan dalam kegiatan penyusunan dokumen Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: ES, AAMW, AS, LMAS, HFM; Penyiapan artikel: ES, AS; Analisis dampak pengabdian: AAMW, LMAS, HFM; Penyajian hasil pengabdian: ES; Revisi artikel: HFM.

Konflik Kepentingan

Seluruh penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial atau non-finansial yang terkait dengan artikel ini.

Pendanaan

Kegiatan ini tidak memperoleh pendanaan dari sumber manapun.

Daftar Pustaka

- Ahmadzai, H., Tutundjian, S., & Elouafi, I. (2021). Policies for Sustainable Agriculture and Livelihood in Marginal Lands: A Review. *Sustainability*, 13(16), 8692. <https://doi.org/10.3390/su13168692>
- Aulia, F. M. (2024). Urgensi Satu Data Terperingkat dalam Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem “Nol” Persen. *Bappenas Working Papers*, 7(3), 210–226. <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i3.362>
- Hailu, A. G., & Amare, Z. Y. (2022). Impact of productive safety net program on food security of beneficiary households in western Ethiopia: A matching estimator approach. *Public Library of Science One*, 17(1), e0260817. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260817>
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13308>
- Howe, L. B. (2022). The spatiality of poverty and popular agency in the GCR: Constituting an extended urban region. *Urban Geography*, 43(9), 1287–1308. <https://doi.org/10.1080/02723638.2021.1922200>
- Juliansyah, Khoffifah, Khoiriyah, & Daryono. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan di Kalimantan Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2642–2654. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1271>
- Kalikoski, D. C., Jentoft, S., McConney, P., & Siar, S. (2019). Empowering small-scale fishers to eradicate rural poverty. *Maritime Studies*, 18(2), 121–125. <https://doi.org/10.1007/s40152-018-0112-x>
- Lin, C., Zhai, H., & Zhao, Y. (2022). Industrial Poverty Alleviation, Digital Innovation and Regional Economically Sustainable Growth: Empirical Evidence Based on Local State-Owned Enterprises in China. *Sustainability*, 14(23), 15571. <https://doi.org/10.3390/su142315571>
- Marchetti, S., & Secondi, L. (2022). The Economic Perspective of Food Poverty and (In)security: An Analytical Approach to Measuring and Estimation in Italy.

- Social Indicators Research*, 162(3), 995–1020. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02875-5>
- Mundzir, I., Nilamsari, R. F., Kurniaharnoto, F., Fajrina, N. N., Fionita, R., Khansa, N. M., & Aulia, F. S. (2021). Inclusion of venture capital to improve the welfare of female headed households in South Jakarta. *Community Empowerment*, 6(11), 1991–1996. <https://doi.org/10.31603/ce.5330>
- Noer, K. U. (2021). Empowerment of women as head of poor family through the P2WKSS program in Bekasi City. *Community Empowerment*, 6(5), 864–876. <https://doi.org/10.31603/ce.4553>
- Pham, A. T. Q., & Mukhopadhyaya, P. (2022). Multidimensional Poverty and The Role of Social Capital in Poverty Alleviation Among Ethnic Groups in Rural Vietnam: A Multilevel Analysis. *Social Indicators Research*, 159(1), 281–317. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02747-y>
- Ponce, P., Aguirre-Padilla, N. I., Oliveira, C., Álvarez-García, J., & Del Río-Rama, M. D. L. C. (2020). The Spatial Externalities of Tourism Activities in Poverty Reduction. *Sustainability*, 12(15), 6138. <https://doi.org/10.3390/su12156138>
- Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund program. *Public Library of Science One*, 18(6), e0283041. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *JISPAR: Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Pemerintahan*, 13(1), 397–416. <https://doi.org/10.37304/jispar.v13i1.10520>
- Shi, Z., & Qamruzzaman, M. (2022). Re-Visiting the Role of Education on Poverty Through the Channel of Financial Inclusion: Evidence From Lower-Income and Lower-Middle-Income Countries. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 873652. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.873652>
- Si, S., Ahlstrom, D., Wei, J., & Cullen, J. (2020). Business, Entrepreneurship and Innovation Toward Poverty Reduction. *Entrepreneurship & Regional Development*, 32(4), 1–20. <https://doi.org/10.1080/08985626.2019.1640485>
- Singh, P. K., & Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. *Public Library of Science One*, 15(1), e0227176. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227176>
- Tucker, R., Johnson, L., Liang, J., & Allender, S. (2022). Strategies for Alleviating Spatial Disadvantage: A Systems Thinking Analysis and Plan of Action. *Sustainability*, 14(17), 10477. <https://doi.org/10.3390/su141710477>
- Ullah, A., Kui, Z., Ullah, S., Pinglu, C., & Khan, S. (2021). Sustainable Utilization of Financial and Institutional Resources in Reducing Income Inequality and Poverty. *Sustainability*, 13(3), 1038. <https://doi.org/10.3390/su13031038>
- Valle, L., Costan, E., Costan, F., General, E., Alcantara, G., Kilat, R. V., Batican, I., Olivar, G. M., & Avila, D. (2022). Community extension MSME's entrepreneurial activities in relation to poverty reduction. *Frontiers in Sociology*, 7, 1038006. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.1038006>
- Wahyono, N. D., Hasanah, N., Parmawati, R., & Wong, W.-K. (2023). Improving Economic Welfare through Capital Development: Case Study of Smallholder Dairy Farmers in Pujon District. *Sustainability*, 15(11), 8453. <https://doi.org/10.3390/su15118453>
- Wirata, G. (2022). *Kebijakan Sosial. Kebijakan Pemerintah Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengentasan Kemiskinan*. Pena Persada.
- Yusri, M. (2024). *Integrasi Kebijakan Regional dan Kemiskinan*. UMSU Press.

Zulyanto, A. (2022). Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), 32-40. <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23385>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
